

# Ironi Korupsi Sang Menteri

Oleh: Hendra Kurniawan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 3 September 2014 lalu telah menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka terkait erat dengan hasil pengembangan penyidikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini.

Jauh sebelumnya memang Rudi Rubiandini tertangkap tangan menerima suap dari Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan pada tanggal 14 Agustus 2013. Jero Wacik melalui Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno dan bawahannya lainnya diduga melakukan pemerasan terhadap pihak rekanan proyek sejak tahun 2011. Modus lainnya yaitu Jero meminta tambahan dana operasional menteri (dom) dengan menganggarkan kegiatan rapat rutin yang ternyata fiktif.

Jero Wacik dijerat dengan Pasal 12e atau Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP. Dia disangka melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan dengan ancaman hukuman maksimal penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. Kasus yang dia hadapi ini tidak mengejutkan karena Kementerian ESDM memang dikenal sebagai lahan basah yang selalu menerima aliran uang dan sejak dulu banyak permainan di dalamnya. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka diharapkan dapat semakin menguak rantai korupsi para mafia dalam tata kelola migas

di Indonesia.

## Bukan menteri pertama

Jero Wacik bukanlah menteri pertama dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini yang terjerat kasus korupsi. Dua tahun yang lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang. Andi Mallarangeng sama seperti Jero Wacik juga politisi dari Partai Demokrat. Beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Andi Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. Barangkali inilah sikap ksatria dia yang patut dicontoh oleh pejabat negara lainnya ketika terjerat kasus yang sama. Dia telah dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun pada tanggal 18 Juli 2014.

Setelah Andi Mallarangeng, pada masa-masa Pemilu kemarin, kabinet kembali harus kehilangan salah satu personilnya. Pada tanggal 22 Mei 2014, Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa haji tahun 2012-2013. Dia yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengikuti jejak Andi Mallarangeng dengan menyatakan pengunduran dirinya sebagai menteri. Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang memiliki anggaran besar. Tidak hanya sekali ini Kementerian Agama diterpa kasus korupsi.

Jero Wacik menjadi menteri ketiga dalam Kabinet SBY yang harus mengundurkan diri karena kasus

korupsi. Jero Wacik telah menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai menteri pada tanggal 5 September 2014. Dia juga menambah panjang daftar politisi dari Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya tercatat ada nama M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, Hartati Moerdaya, Anas Urbaningrum, dan Sutan Bhatoegana.

Menariknya, Partai Demokrat sebagai partai penguasa saat ini sejak awal telah menyatakan sikap anti korupsi. Kita tentu ingat dalam kampanye Partai Demokrat lima tahun lalu dengan lantang tokoh-tokoh partai ini berusaha meyakinkan masyarakat dengan slogan "Katakan Tidak pada Korupsi!". Ironisnya di ujung kekuasaan justru banyak politisi dari Partai Demokrat yang terjerembab dalam kasus korupsi, termasuk mereka yang saat kampanye turut meneriakkan slogan anti korupsi. Apakah ini artinya slogan itu hanya sekedar pemanis mulut belaka di saat kampanye?

## Korupsi yang membudaya

Perilaku korupsi di Indonesia tampaknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Seseorang yang menjadi pejabat seolah wajib membagi keberuntungan dengan keluarga besar, teman-teman, maupun kelompok politik yang dianggap sudah membesarkannya. Ini masih ditambah lagi dengan gaya hidup. Mereka yang disebut sukses apabila mampu menunjukkan berbagai ukuran materi seperti rumah, mobil, hingga koleksi barang antik. Tidak hanya soal materi, saat ini

semakin terbuka berbagai skema antara koruptor dengan wanita cantik. Terbukti hampir setiap kasus korupsi dapat dipaparkan ada aliran dana ke kantong-kantong banyak wanita cantik yang notabene tidak memiliki hubungan pernikahan atau kerabat. Bahkan politisi partai yang tertangkap tangan menerima suap di sebuah hotel sedang ber-*indehoy* dengan wanita muda yang bukan isterinya.

Hukuman yang saat ini dijatuhkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia tampaknya tidak menantang sehingga tidak memberi efek jera. Sampai kapan pun KPK tak akan terus menghadapi kesulitan tak akan mampu untuk benar-benar menuntaskan masalah korupsi yang telah mengakar kuat ini. Perilaku korupsi dewasa ini sudah sarung terstruktur, sistematis, dan masif. Terlalu jamak korupsi muncul di setiap lini seakan telah membudaya.

Untuk itu yang perlu diubah sebenarnya ialah cara berpikir mental pejabat dan masyarakat. Jalan dapat ditempuh melalui pendidikan, penguatan iman (agama), penanaman budi pekerti yang membutuhkan proses lama. Cara yang lebih efisien dapat dilakukan dengan membuat sistem dan perangkat baru yang dapat memaksa terbentuknya budaya anti korupsi dari diri setiap orang. Semoga kelak generasi muda bangsa ini akan sama pada masanya yang menganggap bahwa perilaku korupsi sudah tidak zamannya lagi! \*\*\*

**Hendra Kurniawan MPd, DSc**  
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta